

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keikutsertaan perempuan dalam ranah politik bukanlah suatu hal yang baru, sebenarnya dalam sejarah perjuangan kaum perempuan bahwa partisipasi perempuan dalam hal pembangunan sudah banyak mencapai kemajuan diantaranya dibidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan maupun pemerintahan. Keterwakilan perempuan menjadi wakil rakyat adalah sebuah usaha untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam wilayah legislasi. Dengan mereka terlibat dalam parlemen diharapkan kepentingan para kaum hawa dapat terwakili.

Setelah membahas hasil penelitian dan melihat bagaimana anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bantul menjalankan perannya dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Bantul periode 2009-2014, maka dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014

- a. Peran dalam fungsi legislasi anggapat dikatakan bahwa anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bantul sudah aktif ikut serta dalam bertugas menyusun, mengkoordinasikan serta menyiapkan rancangan program legislasi daerah atau disebut

rancangan peraturan daerah (perkada) bersama-sama anggota

legislasi yang lain. Dan ikut berperan dalam memberikan pertimbangan, terhadap masukan saran dari anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, ikut berperan dalam pembahasan ranperda bersama Kepala Daerah serta mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap ranperda

- b. Peran dalam fungsi anggaran Anggota legislatif pada badan anggaran DPRD Kabupaten Bantul yakni Ibu Dra.Hj.Maslakhah dan Ibu Arni Tyas Palupi, S.T. selaku anggota perempuan dalam badan anggaran DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 mereka berperan penting untuk mengimbangi serta ikut aktif dalam memberikan saran pendapat pada Bupati dan DPRD serta ikut dalam menyusun anggaran.
- c. Peran dalam fungsi pengawasan Dari jumlah anggota legislatif perempuan yang berjumlah 7 orang anggota diharapkan bisa mengimbangi juga berperan aktif dalam proses pengawasan. Dan tentunya keberadaan anggota legislatif perempuan dirasa sudah aktif, karena mengingat tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Peran pengawasan yang mereka lakukan dalam hal ini yakni dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja. Dan anggota legislatif perempuanpun tentu saja ikut dalam kegiatan tersebut.

- a. Faktor Pendukung dari dalam diri sendiri yakni keinginan dari anggota legislatif perempuan tersebut, serta adanya dukungan dari keluarga.
- b. Faktor penghambat, masih adanya budaya patriarki yang menyatakan bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, hambatan pribadi dan psikologis, dan terlihat juga dari peran dasar perempuan yakni peran produktif dan peran reproduktif

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menemukan berbagai temuan dilapangan, serta Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran terkait “Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014”, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif, diharapkan perempuan anggota legislatif perempuan tersebut agar lebih aktif dalam forum, dalam memberikan argumen maupun saran-saran untuk kepentingan rakyat. Juga agar lebih peka terhadap masukan-masukan dari masyarakat.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, maka DPRD sebaiknya menerima lebih banyak masukan dari masyarakat secara umum mengenai

3. Diharapkan juga agar faktor-faktor penghambat yang ada, seperti faktor budaya patriarki tentang anggapan masyarakat tersebut dijadikan motivasi kembali bagi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
4. Mengenai fungsi pengawasan bahwa baiknya pengadaan acara gerbang proklamasi terus dilakukan sebagai upaya mendengar aspirasi masyarakat.
5. Saran kepada anggota legislatif :
 1. Ibu Maslakah : agar tidak terlalu banyak ketidakhadiran dalam rapat. Tentunya harus bisa menyeimbangkan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat
 2. Ibu Sri Murtinah : jika dilihat dari tingkat kehadiran bahwa sudah bagus karena tidak adanya ketidakhadiran, perlu dipertahankan.
 3. Ibu Suratun : sama halnya dengan Ibu Sri Murtinah untuk tingkat kehadiran sudah bagus karena tidak adanya ketidakhadiran dan